STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN CALON PESERTA PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN HUKUM
BPSDM HUKUM
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI

NOMOR SOP	SDM-06.OT.02.02 TAHUN 2025
TANGGAL PEMBUATAN	25 MEI 2022
TANGGAL REVISI	18 MARET 2025
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM,** **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP 196610261990012001**
NAMA SOP	**PERMINTAAN CALON PESERTA PENILAIAN KOMPETENSI**

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Tahun 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi pelaksanaan penilaian kompetensi;
2. Memahami peraturan tentang organisasi dan tata kerja;
3. Memahami dan mengetahui mekanisme permintaan calon peserta penilaian kompetensi

KETERKAITAN :

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DISBURSMENT PLAN, KALENDER KEGIATAN DAN RENCANA KERJA KAS
2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DAN POSTUR RENCANA ANGGARAN BIAYA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Peraturan Perundang-undangan
2. Alat Tulis
3. Komputer/Printer
4. Jaringan Internet
5. Speaker/Pengeras Suara/Loud

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum akan terhambat dan tidak berjalan optimal

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-06.OT.02.02 TAHUN 2025
TANGGAL PEMBUATAN	25 MEI 2022
TANGGAL REVISI	18 MARET 2025
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN CALON PESERTA PENILAIAN KOMPETENSI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pusat Penilaian Kompetensi	Ketua Tim	Anggota	Kasubbag Tata Usaha	Kepala Biro SDM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Ketua Tim Kerja untuk mempersiapkan permintaan data peserta penilaian kompetensi						RKAKL, Target Kinerja	30 Menit	Lembar disposisi	
2	Menugaskan Anggota untuk mempersiapkan surat permintaan data calon peserta penilaian kompetensi						RKAKL, Target Kinerja	30 Menit	Lembar disposisi	
3	Membuat draft surat permintaan calon peserta penilaian kornpetensi dan lampiran format pengusulan data kepada Biro SDM						Draft Surat Permintaan Calon Peserta Penilaian Kompetensi	30 Menit	Lembar disposisi, Konsep surat	
4	Menerima dan memeriksa draft surat permintaan calon peserta penilaian kompetensi, serta menyerahkan hasil yang sudah dikoreksi kepada kapus Penkom (Jika ada koreksi dikembalikan ke anggota)						Draft Surat Permintaan Calon Peserta Penilaian Kompetensi	1 Jam	Draft Surat Permintaan Calon Peserta Penilaian Kompetensi	
5	Menerima dan memeriksa draft surat permintaan calon peserta penilaian kompetensi, yang sudah diperiksa oleh Ketua Tim, serta menandatangani surat untuk dikirim kepada Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementrian Hukum dan diserahkan kepada Kasubag TU untuk dikirim (jika ada koreksi dikembalikan ke Anggota)						Draft Surat Permintaan Calon Peserta Penilaian Kompetensi	1 Jam	Surat Permintaan Calon Peserta Penilaian Kompetensi	
6	Kasubbag Tata Usaha mengirimkan surat permintaan calon peserta penilaian kompetensi kepada Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementrian Hukum						Surat Permintaan Calon Peserta Penilaian Kompetensi	30 Menit	Surat Permintaan Calon Peserta Penilaian Kompetensi	
7	Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementrian Hukum Menerima surat permintaan calon peserta penilaian kompetensi						Surat Permintaan Calon Peserta Penilaian Kompetensi	30 Menit	Surat Permintaan Calon Peserta Penilaian Kompetensi	

Mengetahui
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi

Ria Gantini
NIP 196906221994032001